



PENGADILAN PAJAK

JL. HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120,
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334; LAMAN: www.setpp.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-46/PAN.Wk/2025

Sehubungan dengan adanya pengembalian Salinan Putusan Peninjauan Kembali oleh kantor pos, maka dengan ini diumumkan daftar salinan putusan yang kembali pos dimaksud, sebagai berikut:

No	Nomor Putusan Mahkamah Agung RI	Tanggal Ucap	Nama Para Pihak
1	436/B/PK/Pjk/2025	11 Mei 2010	BUT Motorola Inc.
2	1999/B/PK/Pjk/2025	11 Desember 2013	PT Sara Lee Household Indonesia

Selanjutnya bagi para pihak yang ingin dikirim kembali salinan putusan di atas, dapat menyampaikan surat permohonan pengiriman kembali salinan putusan dengan format terlampir, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-02/PP/2023 tentang Prosedur Penatausahaan Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali.

Demikian pengumuman ini dibuat, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 16 Juli 2025
Wakil Panitera Pengadilan Pajak,



Ditandatangani secara elektronik
Abdul Azis Hady, S. Kom., S.H.



Lampiran I
Pengumuman Wakil Panitera
Nomor PAN-46/PAN.Wk/2025
Tanggal 16 Juli 2025

**DATA SALINAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
YANG KEMBALI POS**

No	Nomor Putusan Mahkamah Agung RI	Nama Para Pihak	Tanggal Pengiriman Awal (Pertama)	Alamat Pengiriman Awal (Pertama)
1	436/B/PK/Pjk/2025	BUT Motorola Inc.	25 April 2025	Gedung BRI II Lantai 10 Suite 1001, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Selatan 10220
2	1999/B/PK/Pjk/2025	PT Sara Lee Household Indonesia	18 Juni 2025	Jalan Raya Bogor KM. 27, Ciracas, Jakarta Timur 13740

FORMAT
SURAT PERMOHONAN PENGIRIMAN KEMBALI SALINAN PUTUSAN

Nomor :(1).....
Lampiran :(2).....
Hal : Permohonan Pengiriman Kembali Salinan Putusan(3).....

Yth. Sekretaris Pengadilan Pajak
Jalan Hayam Wuruk Nomor 7
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :(4).....
NPWP :(5).....
Jabatan :(6).....
Alamat :(7).....
Nomor Telepon :(8).....
Email :(9).....
Bertindak selaku*) : ☐ Direktur/Kepala Kantor/Gubernur/Bupati
☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus dari Wajib Pajak badan:
Nama Perusahaan :(10).....
NPWP :(11).....
Alamat :(12).....

bersama ini menyampaikan permohonan untuk pengiriman Kembali Salinan putusan sebagai berikut:

No.	Nomor Putusan	Tanggal Ucap	Alamat Pengiriman Kembali
1.	(13).....	(14).....	(15).....
dst.			

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, mohon ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Wajib Pajak/Pengurus/Direktur/Kepala Kantor)**

.....(16).....

Tembusan:
Ketua Pengadilan Pajak

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
2. *) : Diisi salah satu yang sesuai.
3. **) : Pilih salah satu yang sesuai.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGIRIMAN KEMBALI SALINAN PUTUSAN**

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Nomor (3) : diisi dengan tanggal surat permohonan diajukan.
- Nomor (4) : diisi dengan nama penandatangan surat permohonan.
- Nomor (5) : diisi dengan NPWP penandatangan surat permohonan.
- Nomor (6) : diisi dengan jabatan penandatangan surat permohonan.
- Nomor (7) : diisi dengan alamat penandatangan surat permohonan.
- Nomor (8) : diisi dengan nomor telepon penandatangan surat pernyataan.
- Nomor (9) : diisi dengan alamat surat elektronik (email).
- Nomor (10) : dalam hal penandatangan merupakan pengurus yang mewakili Wajib Pajak badan, diisi dengan nama Wajib Pajak badan yang diwakili.
- Nomor (11) : dalam hal penandatangan merupakan pengurus yang mewakili Wajib Pajak badan, diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan yang diwakili.
- Nomor (12) : dalam hal penandatangan merupakan pengurus yang mewakili Wajib Pajak badan, diisi dengan alamat Wajib Pajak badan yang diwakili.
- Nomor (13) : diisi dengan nomor putusan yang dimintakan untuk dikirimkan kembali.
- Nomor (14) : diisi dengan tanggal ucap atas putusan yang dimintakan untuk dikirimkan kembali.
- Nomor (15) : diisi dengan alamat untuk pengiriman kembali Salinan putusan.
- Nomor (16) : diisi dengan nama, jabatan dan tanda tangan dari penandatangan surat permohonan.